

Analisis Determinan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur dalam Era Desentralisasi Fiskal

Sitti Retno Faridatussalam^{1*}, Dinar Wahyuningrum².

¹Ekonomi Pembangunan, Universitas Muhammadiyah Surakarta

²Megister Ekonomi dan Studi Pembangunan, Universitas Sebelas Maret

*Email: srf122@ums.ac.id

Abstrak

Keywords:

Belanja Daerah; IPM; PDRB; Kemiskinan; Laju Pertumbuhan Penduduk.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kemiskinan, laju pertumbuhan penduduk, indeks pembangunan manusia, dan produk domestik bruto terhadap belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019. Data yang digunakan diperoleh dari website Kementerian Keuangan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan dan Badan Pusat Statistik. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel. Data panel yaitu gabungan antara data cross section dan time series. Adapun model yang terpilih dalam penelitian ini adalah menggunakan metode Fixed Effect Model (FEM) setelah melakukan uji chow dan uji hausman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel produk domestik bruto, indeks pembangunan manusia, jumlah penduduk miskin, dan laju pertumbuhan penduduk berpengaruh terhadap belanja daerah. Secara parsial variabel kemiskinan berpengaruh positif dan tidak signifikan, laju pertumbuhan penduduk berpengaruh negatif dan tidak signifikan, produk domestik regional bruto berpengaruh positif dan signifikan, dan indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja daerah.

1. PENDAHULUAN

Pembangunan daerah menjadi turunan dari pembangunan nasional dimana pembangunan tersebut amat lekat dengan prinsip desentralisasi fiskal(1). Diadakannya desentralisasi fiskal memberi kesempatan setiap daerah berhak dan berwenang mengatur dan mengendalikan kepentingan pemerintah dan kepentingan masyarakat sejalan dengan peraturan perundangan di Indonesia. Kebijakan pemerintah daerah ketika mengatur rumah tangganya secara mandiri berupaya untuk mengatasi rendahnya pembangunan sumber daya manusia, tingginya angka kemiskinan, rendahnya kualitas hidup

penduduk (2). Peningkatan fasilitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat, kemajuan demokrasi, keadilan, kesetaraan, dan hubungan harmonis yang terjalin antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah merupakan tujuan dari adanya desentralisasi. Adanya dana transfer atau bantuan yang dianggarkan oleh pemerintah pusat lalu diserahkan pada pemerintah daerah menandakan adanya pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia. Kebijakan desentralisasi fiskal membuktikan bahwa daerah di Indonesia mempunyai keberagaman penyediaan layanan publik untuk mencukupi kebutuhan tersebut maka

pemerintah pusat mengalokasikan dana anggaran yang sesuai dengan prioritas pada pembangunan di masing-masing daerah(3).

Desentralisasi fiskal secara langsung berpengaruh pada biaya yang cukup besar untuk menopang kebutuhan daerah untuk menuju pembangunan daerah yang mapan. Penyediaan barang publik dan pembangunan untuk menunjang kegiatan perekonomian di daerah sebagai cerminan kapabilitas pemerintah daerah pada pengendalian keuangan daerah yang tercantum di dalam laporan keuangan pemerintah daerah sebagai tanda kesungguhan pemerintah daerah menjalankan tugas-tugasnya. Problematika perekonomian pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur adalah pertumbuhan ekonomi, tingginya kemiskinan, pembangunan sumber daya manusia. Akibat dari tingginya kemiskinan dan rendahnya pertumbuhan ekonomi adalah rendahnya kualitas pembangunan sumber daya manusia dan tingginya kriminalitas(4). Berkaitan dengan hal tersebut maka prioritas kebijakan pembangunan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur diarahkan pada upaya pengurangan tingkat kemiskinan, meningkatkan pembangunan sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan aspek makro ekonomi, dilihat dari nilai PDRB riil yang menunjukkan perkembangan yang positif, tetapi juga diikuti oleh bertambahnya penduduk tiap tahunnya. Kondisi ini akan mendorong penyediaan anggaran belanja daerah yang semakin besar. PDRB riil dan jumlah penduduk kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur dari tahun 2014 hingga tahun 2019. Penyusunan anggaran tersebut ditata dalam suatu sistem anggaran yang dialokasikan untuk meningkatkan penyelenggaraan di daerah. Belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur yang dianggarkan untuk penyediaan pembangunan sektor publik, memiliki tujuan untuk peningkatan pembangunan sumber daya manusia dan menurunkan jumlah penduduk miskin.

Dalam rangka menyediakan pelayanan publik maka pemerintah daerah melakukan suatu pengeluaran atau belanja daerah. Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Belanja yang dikeluarkan masing-masing daerah jumlahnya berbeda karena setiap daerah mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda.

Belanja daerah merupakan pengalokasian dana yang harus dilakukan secara efektif dan efisien, di mana belanja daerah dapat menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan kewenangan daerah. Apalagi dengan adanya otonomi daerah pemerintah dituntut untuk mengelola keuangan daerah secara baik dan efektif(5). Fenomena yang sedang dihadapi pemerintahan Indonesia di bidang keuangan daerah adalah relatif kecilnya (kontribusi) pendapatan asli daerah di dalam struktur APBD. Dengan kata lain peranan/kontribusi penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat dalam bentuk sumbangan dan bantuan, bagi hasil pajak dan bukan pajak, mendominasi susunan APBD. Belanja atau pengeluaran dapat diklasifikasikan menjadi dua macam berdasarkan jenisnya, yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung adalah belanja yang pembiayaannya dipengaruhi secara langsung oleh adanya suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Belanja tidak langsung adalah belanja yang pendanaannya tidak dipengaruhi secara langsung adanya suatu program atau kegiatan(6).

Dalam 2 jenis belanja tersebut dapat diklasifikasikan kembali menjadi beberapa bagian, yaitu belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Belanja tidak langsung

terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, dan bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Pelaksanaan belanja daerah harus digunakan sesuai target dan anggaran yang ditetapkan. Belanja daerah diutamakan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan. Belanja Daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur yang dialokasikan untuk pembangunan sektor publik, memiliki tujuan untuk penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kualitas pendidikan sehingga mengurangi menurunkan kemiskinan, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi(7). Hal ini berdasarkan fungsi pemerintah daerah sebagai penyedia barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta dan mengusahakan agar alokasi sumber-sumber ekonomi dilaksanakan secara efektif dan efisien. Peningkatan kebijakan alokasi belanja daerah dengan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia sehingga kesejahteraan masyarakat akan menjadi lebih baik. Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Determinan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur dalam Era Desentralisasi Fiskal”

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Domestik Regional Bruto terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2014-2019 ?
2. Bagaimana pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2014-2019 ?
3. Bagaimana pengaruh laju pertumbuhan penduduk terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2014-2019 ?
4. Bagaimana pengaruh kemiskinan terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2014-2019 ?

Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaruh produk domestik regional bruto terhadap belanja daerah di

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019.

2. Menganalisis pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019.
3. Menganalisis pengaruh laju pertumbuhan penduduk terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019.
4. Menganalisis pengaruh kemiskinan terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019.

Tinjauan Pustaka

Desentralisasi Fiskal

Berkembangnya demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta komitmen nasional untuk mewujudkan *good governance* telah menjadi faktor penting yang mendorong pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan realisasi atau bentuk konkret dari ide desentralisasi sebagai wujud dari demokratisasi untuk membangun *good governance*. Otonomi daerah tidak lepas dari konsep dasar, yaitu desentralisasi, demokratisasi, dan *good governance*. Ketiga tersebut saling terkait erat sehingga dalam pelaksanaannya diharapkan akan diperlakukan atau mendapat perlakuan yang sama.

Kebijakan desentralisasi yang melahirkan otonomi daerah adalah bentuk pelaksanaan dari kebijakan demokratisasi karena tanpa adanya desentralisasi maka demokratisasi pemerintahan tidak akan terwujud. Demokratisasi adalah proses perubahan dari struktur dan tatanan pemerintahan yang otoriter menuju arah struktur dan tatanan yang lebih demokratis. Desentralisasi pada pemerintahan di Indonesia telah mendorong perwujudan demokratisasi antara lain melalui penetapan rasionalisasi kekuasaan, peningkatan peran politik masyarakat.

Desentralisasi dibutuhkan untuk menumbuhkan aspirasi daerah sesuai keanekaragaman kondisinya masing-masing(8). Melalui desentralisasi, daerah akan mengalami proses pemberdayaan yang signifikan sehingga dapat memacu kemampuan partisipasi dan kreativitas daerah serta meningkatkan kemampuan

daerah dalam menangani dan menyelesaikan suatu masalah di wilayahnya. Melalui penerapan kebijakan sistem otonomi, daerah harus bisa menemukan solusi yang lebih kreatif dan inovatif atas berbagai masalah yang dihadapi.

Teori Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal, yaitu suatu tindakan pemerintah dalam rangka mengatur jalannya kegiatan ekonomi dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang terdapat didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk nasional dan APBD untuk daerah/regiona. Tujuan dari kebijakan fiskal adalah untuk menstabilkan harga, tingkat output maupun kesempatan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah maka semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan(9).

Belanja Daerah

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja daerah sebagai semua pengeluaran daerah dalam periode

tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. Sebagai sebuah organisasi atau rumah tangga, pemerintah daerah melakukan banyak pengeluaran untuk mendanai kegiatannya. Pengeluaran itu bukan hanya untuk menjalankan roda pemerintahan setiap harinya, akan tetapi juga untuk mendanai kegiatan perekonomian.

Hubungan Kemiskinan, IPM, Jumlah Penduduk, dan PDRB terhadap Belanja Daerah

Kemiskinan adalah suatu keadaan yang berhubungan dengan kebutuhan, kesulitan, dan kekurangan pada berbagai keadaan hidup. Kemiskinan tidak hanya mempunyai kekurangan dalam bidang ekonomi tetapi juga bidang sosial, kesehatan, dan pendidikan. Kemiskinan sebagai gambaran ketidakmampuan dalam pemenuhan standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan pokok yang berupa makanan maupun tempat tinggal dan pakaian layak pakai. Penurunan tingkat kemiskinan melalui belanja daerah akan efektif jika tepat sasaran. Kebijakan fiskal melalui belanja daerah berkonsentrasi pada pemenuhan barang-barang kebutuhan rumah tangga miskin melalui penyediaan dan pengembangan fasilitas publik.

Pembangunan didefinisikan sebagai suatu kegiatan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat diberbagai aspek kehidupan yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya, informasi, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan perkembangan sosial.

Indeks Pembangunan Manusia terdiri dari angka harapan hidup, indeks edukasi, dan indeks realisasi. Hal

terpenting dari desentralisasi fiskal adalah pemerintah daerah diberi kesempatan berotonomi untuk menentukan alokasi realisasi anggaran. Alokasi belanja daerah pemerintah daerah digunakan untuk pembangunan gedung sekolah untuk meningkatkan daya tampung sekolah sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat untuk bersekolah. Belanja daerah juga ditujukan untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi dengan meningkatkan fasilitas kesehatan dan bantuan kesehatan.

PDRB adalah nilai akhir barang dan jasa yang dihasilkan dari berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam satu periode. Semakin besar nilai PDRB pada suatu daerah maka semakin besar pula potensi sumber pendapatan daerah. Peningkatan pendapatan daerah digunakan untuk mendanai program pembangunan daerah. Oleh karena itu, PDRB dan belanja daerah berkorelasi secara positif. Jika PDRB mengalami peningkatan maka belanja daerah juga demikian.

Penduduk menjadi subjek pembangunan, meningkatnya jumlah penduduk mendorong adanya peningkatan fasilitas publik, baik dari segi kuantitas dan kualitas. Perkembangan jumlah penduduk yang semakin besar akan memerlukan anggaran yang semakin tinggi, supaya kualitas pertumbuhan ekonomi lebih baik, pertumbuhan penduduk harus dikendalikan.

Hipotesis

1. Kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja daerah.
2. IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah.

3. PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah.
4. Laju pertumbuhan penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja daerah.

2. METODE

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, yaitu sebanyak 29 daerah kabupaten dan 9 kota. Waktu penelitian yang digunakan tahun 2014-2019. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dari Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Variabel penelitian meliputi variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen terdiri dari kemiskinan, IPM, PDRB, dan laju pertumbuhan penduduk. Variabel dependen adalah belanja daerah. Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi data panel. Sesuai dengan tujuan penelitian dan pengembangan teori, maka model ekonometrika pada penelitian ini sebagai berikut :

$$BD_{it} = \alpha - \beta_1 PVR_{it} + \beta_2 IPM_{it} + \beta_3 PDRB_{it} + \beta_4 IPM_{it} + e_{it}$$

Dimana:

BD : Belanja Daerah

POP: Laju Pertumbuhan Penduduk

PVR: Kemiskinan

PDRB: Produk Domestik Regional

IPM: Indeks Pembangunan Manusia

e : Error Term

Pengujian Statistik

1. Uji R²

Fungsi dari uji R² adalah untuk menunjukkan apakah variabel independen dapat menjelaskan varians variabel dependen dengan baik. Nilai R² mencapai angka 0 hingga 1. Sebuah model *time series* apabila R² mencapai angka 0 berarti variabel independen pada model tersebut lemah dalam menjelaskan variabel dependen.

2. Uji F (Simultan)

Model eksis jika seluruh variabel bebas secara simultan terdapat pengaruh terhadap variabel terikat. Uji eksistensi model adalah uji F. Pada riset ini, pada dugaan sementara adalah $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$, variabel bebas secara simultan tidak berpengaruh variabel terikat; $H_A: \beta_1 \neq 0 \mid \beta_2 \neq 0 \mid \beta_3 \neq 0 \mid \beta_4 \neq 0$, variabel bebas secara serentak mempengaruhi variabel terikat. Hipotesis null tidak ditolak jika nilai probabilitas statistik $F > \alpha$; hipotesis null tidak diterima jika nilai probabilitas $F \leq \alpha$.

3. Uji Validitas Pengaruh

Uji Parsial untuk menganalisis tingkat validitas dari variabel tidak terikat secara individual atau masing-masing variabel. Uji parsial adalah uji t. Hipotesis nul pada uji parsial adalah $\beta_i = 0$, variabel bebas pada urutan ke-i tidak berpengaruh pengaruh secara signifikan; dan Hipotesis Alternatifnya $\beta_i \neq 0$, variabel bebas pada urutan ke-i mempunyai pengaruh yang signifikan. Hipotesis nul dikatakan akan diterima jika nilai probabilitas $t > \alpha$; Hipotesis null tidak diterima jika besarnya probabilitas $t \leq \alpha$.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1
 Hasil Estimasi Regresi Data Panel dengan Metode FEM

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PDRB	0.0239	0.0027	8.8289	0.0000
IPM	124.7191	18.8345	6.6218	0.0000
POP	-12.8930	21.2955	-0.6054	0.5456
PVRTY	0.0010	0.0013	0.7914	0.4297
C	-7671.7570	1352.8990	-5.6706	0.0000
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.9706			
Adjusted R-squared	0.9641			
S.E. of regression	224.7584			
F-statistic	149.5494			
Prob(F-statistic)	0.0000			
Durbin-Watson stat	1.8801			

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan hasil estimasi persamaan regresi data panel yang diperoleh dalam penelitian ini adalah :

$$BD_{it} = -7671,7570 + 0,0239PDRB_{it} + 124,7191IPM_{it} - 12,8930POP_{it} + 0,00100PVRTY_{it}$$

Koefisien Determinasi

Hasil dari pengolahan data diperoleh nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,9706. Hasil ini menunjukkan bahwa belanja daerah sebagai variabel dependen dalam model penelitian ini dapat dijelaskan sebesar 97,06% oleh variabel independen dalam model penelitian ini yaitu produk domestik regional bruto, indeks pembangunan manusia, laju pertumbuhan penduduk, dan kemiskinan. Sedangkan sisanya 2,94%.

Uji F

Dari Tabel 1, terlihat nilai p, probabilitas, atau signifikansi empirik statistik F pada estimasi model memiliki nilai 0,0000, yang berarti $< 0,01$; jadi H_0 ditolak, kesimpulan model yang dipakai dalam penelitian eksis.

Uji T

Tabel 2.
 Hasil Regresi Data Panel Uji T

Variabel	Sig. t	Kriteria	Kesimpulan
PDRB	0,0000	$\leq 0,05$	Signifikan ada $\alpha = 0,05$
IPM	0,0000	$\leq 0,05$	Signifikan ada $\alpha = 0,05$
POP	0,5456	$> 0,05$	Tidak signifikan
PVRTY	0,4297	$> 0,05$	Tidak signifikan

Dari Tabel 2 terlihat nilai p (p value), probabilitas, atau signifikansi empirik statistik t variabel PDRB sebesar 0,0000 ($\leq 0,05$); variabel IPM 0,0000 ($\leq 0,05$); variabel POP 0,5456 ($> 0,05$; dan variabel PVRTY memiliki nilai p (p value), probabilitas, atau signifikansi empirik statistik t sebesar 0,4297 ($> 0,05$). Dari hasil ini dapat disimpulkan variabel PDRB dan IPM secara individual memiliki pengaruh signifikan. Sedangkan variabel POP dan PVRTY tidak memiliki pengaruh yang signifikan.

Interpretasi Model Terpilih

Variabel PDRB memiliki koefisien regresi sebesar 0,0239. Pola hubungan variabel independen PDRB terhadap belanja daerah adalah liner linier sehingga apabila PDRB naik sebesar satu juta rupiah maka belanja daerah akan naik sebesar 0,0239 miliar rupiah.

Variabel Indeks Pembangunan Manusia memiliki koefisien regresi sebesar 124,7191. Pola hubungan variabel independen Indeks Pembangunan Manusia

terhadap belanja daerah adalah linier linier sehingga apabila Indeks Pembangunan Manusia naik sebesar satu maka belanja daerah akan naik sebesar 124,7191 miliar rupiah.

Pembahasan

PDRB dengan Belanja Daerah

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zahari (2017) yang berjudul “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi” bahwa Pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal yakni suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah/regional(10). Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output maupun kesempatan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi. Teori Peacock dan Wiseman menyebutkan bahwa perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah; dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengaruh PDRB dan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, meningkatnya PDRB menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar. Maka pengeluaran pemerintah yang diklasifikasikan menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung jika meningkat maka menyebabkan PDRB meningkat pula.

IPM dengan Belanja Daerah

Hasil penelitian ini sejalan dengan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rahmat dan Bachtiar (2016) yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Barat” penelitian ini menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diukur melalui tiga indikator yakni tingkat pendidikan, kesehatan, dan daya beli (ekonomi)(11). Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan tingkat upah/pendapatan

masyarakat, ketimpangan geografi serta kondisi sosial masyarakat yang beragam. Keberhasilan pembangunan manusia tidak terlepas dari peran serta pemerintah dalam menciptakan kebijakan untuk tercapainya keadilan sosial.

Pengeluaran pemerintah digunakan sebagai wujud kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam suatu wilayah. Pengeluaran pemerintah untuk pembiayaan sektor-sektor publik yang penting yang menunjang meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang dijadikan pemerintah sebagai prioritas pemerintah dalam melakukan pembangunan kualitas sumberdaya manusia yang dilihat dari IPM adalah investasi pada sektor pendidikan dan kesehatan. Kesehatan merupakan kesejahteraan dan pendidikan merupakan hal yang wajib dalam mencapai kehidupan yang layak(12).

Teori Musgrave dalam bahwa pengeluaran pemerintah dialokasikan untuk menyediakan sarana dan prasana pendidikan, kesehatan, transportasi, dan lain sebagainya. Hal ini selaras dengan kondisi yang terjadi pada saat ini apabila Indeks Pembangunan Manusia mengalami peningkatan yang berarti komponen-komponen yang mendukung Indeks Pembangunan Manusia juga mengalami peningkatan misal apabila masyarakat banyak yang sehat dan menempuh pendidikan tinggi sehingga dapat meningkatkan produktivitas.

Laju Pertumbuhan Penduduk terhadap Belanja Daerah

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Devita (2014) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Laju pertumbuhan penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi” yang menunjukkan adanya hubungan positif antara laju pertumbuhan penduduk dengan belanja daerah. Semakin besar laju pertumbuhan penduduk maka pengalokasian pengeluaran pemerintah daerah juga semakin tinggi(13).

Laju pertumbuhan penduduk yang besar bagi pemerintah daerah dipandang sebagai aset modal dasar pembangunan

tetapi sekaligus juga menjadi beban pembangunan. Dapat dikatakan sebagai aset apabila dapat meningkatkan kualitas maupun keahlian atau ketrampilan penduduk sehingga akan meningkatkan produksi nasional. Laju pertumbuhan penduduk yang besar akan menjadi beban jika alokasi belanja daerah rendah, serta distribusi pengalokasian belanja daerah dan kualitasnya hanya menuntut pelayanan sosial dan tingkat produksinya rendah sehingga menjadi tanggungan penduduk yang bekerja secara efektif.

Teori Peacock dan Wiseman menyatakan bahwa masyarakat memahami besarnya pajak yang dipungut pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah atau belanja pemerintah. Jadi, masyarakat atau penduduk paham bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai kegiatan pemerintah sehingga masyarakat dengan senang hati membayar pajak. Semakin banyak masyarakat yang membayar pajak maka semakin banyak pula belanja daerah yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota(10).

Namun, realisasi penerimaan pajak di Jawa Timur kurang mencapai target. Tidak tercapainya realisasi pajak dari target disebabkan karena rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan kewajiban membayar pajak. Penerimaan daerah yang berasal dari pajak dirasa kurang berdampak pada besarnya belanja daerah.

Kemiskinan terhadap Belanja Daerah

Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sasana (2009) dengan judul “ Peran Desentralisasi Fiskal terhadap Kinerja Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah” yang menunjukkan adanya hubungan negatif antara kemiskinan dan belanja daerah(14). Banyak ukuran untuk menentukan angka kemiskinan, salah satunya adalah garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah suatu ukuran yang diukur pada besarnya pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan hidup yaitu kebutuhan yang berupa makanan maupun yang berupa non makanan. Garis kemiskinan digunakan untuk mengetahui kemampuan seseorang dapat dikatakan miskin maupun tidak miskin atau garis

yang digunakan dan menentukan jumlah penduduk miskin. Garis kemiskinan yang didasarkan pada konsumsi terdapat dua elemen yaitu:

- 1) Pengeluaran yang dikeluarkan untuk pemenuhan standar gizi minimum dan kebutuhan dasar yang lain;
- 2) Jumlah kebutuhan lain yang sangat beraneka ragam, yang mencerminkan biaya yang dikeluarkan dalam kehidupan sehari-hari.

Adanya hubungan negatif antara kemiskinan dengan pengeluaran pemerintah, karena kemiskinan mempunyai aspek yaitu miskin akan aset, organisasi sosial politik, pengetahuan dan keterampilan, miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi yang diwujudkan dalam bentuk kekurangan gizi, air, dan perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah, maka akan berpengaruh terhadap belanja daerah. Pendidikan dan kesehatan merupakan pelayanan publik yang paling mendasar dan penting untuk mengurangi kemiskinan(15).

Namun, pada kenyataannya alokasi belanja daerah terlihat besar tetapi mencerminkan bahwa pemerintah semakin memprioritaskan keuangannya untuk belanja fisik yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat.

4. KESIMPULAN

Hasil penelitian yang dilakukan untuk mengkaji pengaruh variabel-variabel independen yaitu Pendapatan Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia, Kemiskinan, Laju Pertumbuhan Penduduk terhadap variabel dependen yaitu belanja daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2014-2019, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil estimasi data panel secara *cross section* maupun *time series* model terpilih adalah *Fixed Effect Model*.
2. Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Artinya jika terjadi kenaikan Pendapatan Domestik

Regional Bruto maka akan diikuti dengan kenaikan belanja daerah.

3. Laju Pertumbuhan Penduduk berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja daerah.
4. Kemiskinan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap belanja daerah.
5. IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Artinya jika terjadi kenaikan pada IPM maka akan menaikkan belanja daerah. Sebaliknya jika terjadi penurunan IPM maka akan menurunkan belanja daerah.
6. Hasil estimasi menunjukkan nilai R² sebesar 0,9706 yang dapat diartikan 97,06%, artinya adalah 97,06% variasi belanja daerah dapat dijelaskan oleh variabel independen, dan sisanya 2,94% variasi belanja daerah dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

REFERENSI

Jurnal, Bulletin, dan Majalah Ilmiah

1. Amalia FR, Purbadharmaja IBP. Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah dan Keserasian Alokasi Belanja Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal EP UNUD*. 2014;
2. Soleh A, Ardilla A. Peran Desentralisasi Fiskal Terhadap IPM dan Penyerapan Tenaga Kerja. *PARETO J Ekon dan Kebijakan Publik*. 2018;1.
3. Suyanto. Flypaper Effect Theory dalam Implementasi Kebijakan Desentralisasi Fiskal. *J Ekon Pembang*. 2010;11(1995).
4. Safuridar, Putri NI. Pengaruh Indeks Pembangunan, Pengangguran dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan di Aceh Bagian Timur. *J Samudra Ekon*. 2019;3.
5. Purbarini E, Masdjojo GN. Flypaper Effect on Operating Expenditure and Capital Expenditure of the City Government in Indonesia Flypaper Effect pada Belanja Operasi dan Belanja Modal dari Pemerintah Kota di Indonesia. 2015;16(1):75–84.
6. Amalia F. Flypaper Effect of Regional Expenditures and It's Impact to Regional Inequality In Indonesia. *J Ilmu Ekon*. 2017;6(April):125–38.
7. Kusumadewi DA, Rahman A. FLYPAPER EFFECT PADA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP BELANJA DAERAH PADA KABUPATEN / KOTA DI INDONESIA. 2007;67–80.
8. Sinuraya REM. Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur Tahun 2014-2018). *J Ilm Mhs FEB*. 2020;
9. Zakariya A. Analisis Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Pembangunan dan Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Timur. *J Ilm Mhs FEB*. 2016;
10. MS MZ. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi. *Ekon J Econ Bus*. 2017;1:181–96.
11. Rahmat D, Bachtiar N. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Barat. *E-Journal Univ Andalas*. 2016;
12. Bhakti NA. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Periode 2008-2012. *J Ekon dan Keuang*. 2012;
13. Devita A, Delis A, Junaidi. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *J Perspekt Pembiayaan dan Pembang Drh*. 2014;2.
14. Sasana H. Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah dalam Era Desentralisasi Fiskal. *J Bisnis dan Ekon*. 2009;1.
15. Nalle FW, Emilia K. Kiha. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Kecamatan Insana Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU). *J Din Ekon Pembang*. 2018;1(3):35–45.